



NOTULA

Ngobrol Perihal Isu dan Eskalasi Gerak (NGOBRAL IDE) Online

Utang Luar Negeri Indonesia, Kok Makin Membukit?

Hari, tanggal : **Senin, 26 Maret 2018**

Waktu : **19.30 – 21.30 WIB**

Pembicara : **Azizul Amri (Ketua Front Mahasiswa Nasional Surabaya)**

Notulen : **Silmi Hafizhah**

Utang luar negeri (ULN) atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima ULN dapat berupa pemerintah, perusahaan atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti *International Monetary Fund (IMF)* dan Bank Dunia. Dalam rangka mengumpulkan anggaran pendapatan negara, pemerintah akan menerbitkan obligasi dan menjualnya kepada investor asing (pemberi pinjaman). Obligasi yang dimaksud ialah instrumen utang yang harus dibayar kembali pada waktu tertentu (bisa selama sepuluh tahun atau satu tahun) dengan pokok utang ditambah bunga. Untuk membayar utang, pemerintah harus mengembalikannya dalam mata uang asing saat ia menjual obligasi. Maka dari itu, nilai tukar rupiah terhadap kurs asing khususnya terhadap Dollar Amerika sangat berpengaruh terhadap dinamisnya nilai ULN.

Saat ini kita tau bahwa Ekonomi Indonesia berkiblat kepada hegemoni global yang saat ini status quo kebanyakan ialah Neo-Liberalisme. Perlu diketahui bahwa Neo-Liberalisme ini ialah sebuah ide dimana akumulasi kapital merupakan hal paling esensial untuk membangun sebuah negara. Bagi negara maju, akumulasi kapital ini bisa jadi legitimasi untuk "menjajah" negara berkembang dari segi ekonomi. Tetapi, bagi negara berkembang seperti Indonesia, penjajahan atas ekonomi hanya dianggap sebagai suatu kewajiban dalam rangka "*pertumbuhan ekonomi negara*". Misalnya kita sering melihat dari sudut pandang orang awam bahwa adanya Freeport, Exxon, Phillip Morris di Indonesia merupakan suatu hal yg wajar dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan Indonesia. Banyak yang tidak tahu, bahwa hal ini adalah bentuk *soft* dari penjajahan itu sendiri. Untuk menjawab permasalahan paling esensial dari orientasi "neo-liberal" adalah dengan menyediakan dana sebanyak-banyaknya untuk kelancaran akumulasi kapital (orientasi profit) demi apa yg dikatakan sebagai "pembangunan".



Maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Indonesia melakukan "penyediaan dana" untuk agenda pembangunan ini? Ada beberapa cara. Pertama, dari penarikan pajak terhadap masyarakat. Kedua, peningkatan produksi-sesuai *demand* kepada konsumen luar negeri sebagai salah satu keran pendapatan bukan pajak. Ketiga, penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dan yang terakhir adalah utang luar negeri. Pada cara ketiga inilah fokus pembahasan kita. Tentu kita masih mengingat betul kado awal tahun Jokowi mengenai kenaikan tarif BBM non-subsidi, kenaikan biaya administrasi kendaraan bermotor dll.

Kenapa sih pemerintah melakukan itu?

Sederhananya, karena segala cara yang bisa dilakukan pemerintah sudah buntu. Melalui ULN, Utang ini sudah terpakai pembangunan infrastruktur dan sudah menumpuk terlalu banyak. Mengupayakan meningkatkan produksi? Ekonomi Indonesia saat ini sedang *lesu*. Maka cara yang dapat ditempuh yakni dengan menaikkan pajak masyarakat dan menghilangkan subsidi BBM (premium) sehingga masyarakat beralih ke BBM pertalite/pertamax yang harganya sudah dinaikkan tinggi. Inilah logika "profit" dari pemerintah.

Berbicara mengenai ULN, tentu kita perlu mengetahui bagaimana trend yang terjadi di Indonesia sendiri mengenai ULN dari setiap periode presiden. Menurut UU No. 17 tahun 2003, negara tidak boleh melakukan hutang dengan rasio 60% atau lebih dari PDB. Saat ini ULN Indonesia telah mencapai angka 30%. Selain itu, jika dikatakan Utang Luar Negeri Indonesia itu setiap tahunnya naik, itu benar. Karena dari PDB pun memang meningkat setiap tahunnya ditambah dengan kurs Dollar yg dinamis dan cenderung naik setiap tahunnya

Tapi, bagaimana kemudian bahaya yang mengintai dari ULN ini sendiri ketika terlalu tinggi?

Kerugian utama adalah efek domino kenaikan harga barang, kenaikan pajak, dan kebutuhan pokok. Kenapa? Karena ketika Negara sedang krisis, ekonomi daerah melesu, akhirnya jawaban terakhir pemerintah untuk membayar ULN adalah dari uang pribadi rakyat. Analogi sempurna ketika kita gunakan "Kado Awal Tahun Jokowi awal 2017" sebagai contohnya. Maka selanjutnya, menjadi hal yang paling krusial kekhawatiran bahwa negara tidak mampu membayar Utang sesuai Obligasinya, sehingga kecenderungan yang terjadi adalah pemaksaan agar memberikan "penguasaan sektoral" misal blok migas, kepada negara yg dihutangi. Tentu hal ini tidak akan jauh kedoknya dari "investasi" bukan "penjajahan". Mengingat bagaimana sejarah telah mengajarkan kepada kita, akibat tingginya hutang Indonesia saat orde lama dan orde baru Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Soeharto dengan bangga membuat peraturan yg dikenal dengan "UU PMA (Penanaman Modal Asing)"



yang sebenarnya tidak lain tidak bukan ialah upaya memudahkan keran investasi modal asing untuk menguasai sektor-sektor penting di Indonesia.

Yang kemudian perlu disoroti, apa yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini adalah "yakin" akan mampu membayar ULN dengan "hasil dari pembangunan infrastrukturnya yang digadang gadang dalam Nawacita". Padahal, kita tahu bahwasanya progress dari pembangunan infrastruktur tersebut belum sampai 50 persen.

Akhir kata, polemik ULN yang telah menoreh angka Rp. 4.915.000.000.000.000.00,- (4915 T) atau jika dibebankan kepada setiap penduduk setiap orang akan menanggung Rp15.000.000,- (15 Juta) ini bukan sekedar permasalahan teknis mengenai ekonomi mikro dan makro. Tetapi jauh lebih dalam mengenai sistem Ekonomi-Politik kita yang masih berpijak pada Neo-Liberalisme yang berorientasi kepada akumulasi kapital (profit) untuk menutup lubang dari utang-utang sebelumnya. *Gali lubang tutup lubang.*